

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON
TUNAI (BPNT) DI DESA WRINGIN ANOM KECAMATAN
PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO**

***IMPLEMENTATION OF NON-CASH FOOD AID PROGRAM (BPNT)
POLICY IN WRINGIN ANOM VILLAGE, PANARUKAN DISTRICT,
SITUBONDO DISTRICT***

Hasan Muchtar Fauzi ¹⁾, Nina Sa'idah Fitriyah ²⁾, Erfina Riska Hidayat ³⁾

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

¹⁾hasanmuchtar.fauzi77@yahoo.com

DOI https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3939

ABSTRAK

Program Bantuan Pangan Non Tunai BPNT merupakan program Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat miskin rawan pangan, agar mendapatkan bahan pangan untuk kebutuhan rumah tangganya. Bantuan tersebut juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Tujuan penelitian untuk menganalisis program Bantuan BPNT di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, serta untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung. Metode penelitian yang digunakan Kualitatif. Pengumpulan data terdiri dari (1) Observasi. (2) Wawancara. (3) Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan interaktif. Berdasarkan hasil penelitian maka dimulai dari Persiapan, Sosialisasi dan Edukasi, Registrasi, Penyaluran Dana Bantuan, Pemanfaatan Dana Bantuan. Faktor penghambat dan pendukung melalui aplikasi E-Warung adalah (1) Masih Minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat. (2) Kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Kabupaten, (3) lemahnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu, (4) kurangnya sumber daya manusia untuk pendamping di kecamatan, (5) dari segi ketepatan waktu penyaluran masih belum efektif. Faktor pendukung; (1) tingginya partisipasi masyarakat untuk mengetahui mekanisme penyaluran, (2) lokasi e-warung yang strategis (3) komitmen pemerintah dalam meningkatkan dan melakukan verifikasi data, (4) KPM bisa memilih komoditi sesuai dengan kebutuhannya, (5) beras yang disalurkan kualitasnya bagus dan bersal dari daerah setempat.

Kata kunci: implementasi; program bantuan pangan

ABSTRACT

The BPNT Non-Cash Food Assistance Program is a Central Government program to help poor, food-insecure communities to obtain food for their household needs. This assistance also aims to improve the welfare of poor people in Indonesia. The aim of the research is to analyze the BPNT Assistance program in Wringin Anom Village, Panarukan District, Situbondo Regency, as well as to determine inhibiting and supporting factors. The research method used is qualitative. Data collection consists of (1) Observation. (2) Interview. (3) Documentation. The data analysis technique uses interactive. Based on the research results, it starts from Preparation, Socialization and Education, Registration, Distribution of Aid Funds, Utilization of Aid Funds. The

inhibiting and supporting factors using the E-Warung application are (1) There is still a lack of knowledge of the Beneficiary Families. (2) Lack of monitoring, supervision and evaluation from the Regency Coordination Team, (3) weak supervision from the government to control data collection on underprivileged residents, (4) lack of human resources for assistants in the sub-district, (5) in terms of timeliness of distribution, there is still no effective. Supporting factors; (1) high level of community participation in understanding the distribution mechanism, (2) strategic location of e-warung (3) government commitment to improving and verifying data, (4) KPM can choose commodities according to their needs, (5) the quality of the rice distributed good and comes from the local area.

Keywords: implementation; food assistance program

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Banyak faktor yang melatar belakangi kemiskinan mulai dari jumlah pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, Sumber Daya Manusia yang kurang memadai, dan permasalahan lainnya. Masyarakat dapat dikategorikan miskin apabila kurangnya ketersediaan bahan pangan, tempat tinggal yang tidak layak dan kurangnya memperhatikan kondisi kesehatan. Jika diartikan secara luas, kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek yakni aspek primer dan aspek sekunder. Ditinjau dari aspek primer, kemiskinan mencakup miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sosial dan politik, serta adanya keterbatasan pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan aspek sekunder meliputi miskin terhadap jaringan sosial, kurangnya informasi dan rendahnya sumber-sumber keuangan.

Program yang telah dikembangkan oleh Kementerian Sosial untuk penanggulangan kemiskinan salah satunya yaitu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang berlandas pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Program tersebut merupakan program pengganti dari Program Beras Sejahtera (RASTRA) dengan tujuan untuk menekan beberapa kemungkinan adanya penyalahgunaan Bantuan Sosial dari Kemensos agar usaha dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, juga bertujuan untuk

mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberi nutrisi yang seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat(KPM), memberi lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. BPNT dengan menggunakan sistem perbankan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program bagi kemudahan mengontrol, memantau, dan mengurangi penyimpangan. Bantuan ini kemudian akan disalurkan melalui Bank Penyalur yang sudah bekerja sama dengan BPNT.

Situbondo merupakan kota dengan 7 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan, dan 627 Dusun yang melaksanakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Salah satu Kecamatan yang ada di Situbondo seperti Kecamatan Panarukan tepatnya di Desa Wringin Anom telah lama melaksanakan perogram tersebut. Desa Wringin Anom merupakan desa yang mempunyai 6 dusun diantaranya Dusun Kom, Dusun Sabrang, Dusun Blikeran, Dusun Barat Kebun, Dusun Krajan, dan Dusun Wringin Anom Timur yang telah lama melaksanakan program BPNT yakni dari tahun 2019. Desa Wringin Anom memiliki jumlah masyarakat sebanyak 6.923 dengan 2.392 kepala keluarga. Data yang telah dipaparkan diatas maka dapat diuraikan bahwa dalam tiga tahun terakhir data kemiskinan yang ada di desa Wringin Anom mengalami penambahan setiap tahunnya seperti pada tahun 2022 yang merupakan tahun dengan jumlah kemiskinan terbanyak yang apabila diuraikan di Dusun Kom untuk masyarakat miskin terdata ada 150orang, Dusun Sabrang terdapat 164 orang, Dusun Blikeran terdapat 105 orang, Dusun Barat Kebun terdapat 145 orang, Dusun Krajan terdapat 130 orang dan untuk Dusun Wringin Anom Timur terdapat 142 orang dengan total jumlah keseluruhan msyarakat miskin yang ada di Desa Wringin Anom sebanyak 836 orang.

Pada tahun 2020 merupakan tahun dengan jumlah penerima relatif banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yakni pada tahun 2020 terdapat jumlah penerima sebanyak 1.130 orang, untuk tahun 2021 sebanyak 1.254 orang

dan pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah penerima yaitu pada Dusun Kom sebanyak 110 orang, Dusun Sabrang 87 orang, Dusun Blikeran 65 orang, Dusun Barat Kebun 109 orang, Dusun Krajan 85 orang, dan Dusun Wringin Anom Timur 99 orang dengan jumlah keseluruhan sebanyak 555 orang penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penurunan jumlah penerima bantuan BPNT tersebut dikarenakan adanya perubahan data masyarakat seperti meninggal dunia, pindah alamat, dan perekonomian mereka sudah mulai stabil sehingga harus dilakukan penggantian dengan masyarakat lain yang lebih berhak dan membutuhkan. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pun juga telah merasakan hasil dari adanya program BPNT tersebut. Tetapi terdapat permasalahan umum yang sering dijumpai salah satunya seperti tidak tepatnya penggunaan dana bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu;

- a) Bagaimanakah implementasi program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?
- b) Apa faktor penghambat dan faktor pendukung BPNT di desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo?

METODE PENELITIAN

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2016:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lainnya. Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 diantaranya : Sumber data primer, Sumberdata sekunder, Teknik Pengumpulan Data, Wawancara, Observasi, Dokumentasi, Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini, teknik untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang nantinya akan ada perbandingan dari informan pokok dengan informan tambahan yang didapat dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak terkait dan masyarakat penerima BPNT yang ada di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Persiapan

Persiapan merupakan tahapan awal yang ada pada setiap kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu (jumlah KPM di setiap Kabupaten/Kota) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahap persiapan ini terdapat beberapa koordinasi pelaksanaan yang harus dilakukan. Tahap koordinasi pelaksanaan tersebut dapat dibagi menjadi beberapa pembagian seperti Koordinasi pada Tingkat Pemerintahan Pusat, Koordinasi pada Tingkat Pemerintahan Provinsi, dan Koordinasi pada Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahapan awal yang ada pada persiapan memang harus melalui beberapa koordinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pelaksana program bantuan BPNT tersebut. Koordinasi-koordinasi yang dilakukan disesuaikan pula dengan kondisi sebenarnya seperti apabila program tersebut akan dilaksanakan pada ruang lingkup pusat maka pedoman koordinasi yang dilakukan mengikuti ketentuan koordinasi yang telah ada sebelumnya di tingkat Pemerintah Pusat, begitu juga pada tingkat Kabupaten.

Setelah tahap persiapan dilakukan, langkah berikutnya adalah dengan melakukan Penyiapan Data KPM. Dalam proses penyiapan data KPM tersebut bisa langsung menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang merupakan aplikasi dari pemerintah yang memang dikhususkan untuk penerima berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah. Apabila jumlah data tersebut kurang maka daerah dapat mengusulkan calon KPM agar pagu dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan. Sebaliknya, jika jumlah data yang ada melebihi jumlah yang telah ditentukan maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon KPM yang telah ditentukan dengan pagu yang ada. Dalam proses ini, pemerintah Kabupaten/Kota juga diharuskan melakukan pengecekan pada tiap data calon penerima manfaat BPNT yang tertera pada aplikasi SIKS-NG menu BSP dan melakukan pengkinian data apabila diperlukan dengan tujuan untuk memberikan data terkini sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setelah dilakukan penyiapan data KPM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang nantinya kemudian akan disampaikan kepada Kementerian Sosial. Pada pembukaan rekening kolektif, dalam pelaksanaannya dilakukan bagi

KPM yang baru ditetapkan sebagai penerima BPNT.

b) Sosialisasi dan Edukasi

Sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo selaku pemateri dari Dinsos Kabupaten Situbondo, Bank BNI 46, Bank BRI dan didampingi TKSK, Pendamping PKH. Fokus utama pelaksanaan sosialisasi dan edukasi adalah untuk memberikan pengetahuan lebih lengkap kepada masyarakat terkait seluk beluk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu sendiri dengan dimulai dari tujuan awal terkait program BPNT, sasaran yang ditetapkan, syarat-syarat dan juga kriteria penerima bantuan BPNT, materi-materi tambahan lainnya yang perlu disampaikan agar masyarakat juga mudah memahaminya, serta prosedur-prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat yang menjadi KPM untuk mendapatkan bantuan tersebut.

c) Registrasi dan/atau distribusi

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan koordinasi dengan Bank penyalur untuk menyusun jadwal registrasi KPM/distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dimasing-masing Desa. Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ditingkat Kabupaten Situbondo di koordinasikan oleh tim koordinasi bansos pangan Kabupaten Situbondo. Yang ketiga koordinasi di tingkat Kecamatan Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayahnya dan membentuk tim koordinasi BPNT Kecamatan. Tim koordinasi BPNT dibantu oleh pendamping sosia BPNT dalam pendampingan pelaksanaan program BPNT di Kecamatan dan Desa.

d) Penyaluran Dana Bantuan

Setelah tahap registrasi dan distribusi KKS, tahap berikutnya yang ada pada program BPNT adalah dengan menyalurkan dana bantuan tersebut kepada masyarakat penerima manfaat (KPM). Setiap Program yang dibuat oleh pemerintah diupayakan agar dapat tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Program yang telah dilaksanakan harus ditujukan tepat sasaran sesuai dengan kriteria peserta program yang telah ditetapkan, sehingga dilaksanakannya program BPNT berjalan dengan baik. Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini adalah masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di setiap daerah.

Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penyaluran Program BPNT ini telah sesuai dengan masyarakat yang berhak menerima bantuan dalam menentukan suatu program BPNT diperlukan disistem informasi yang baik dan pembinaan yang dilakukan secara intensif. Apakah program yang dilaksanakan bermanfaat bagi yang menerima atau tidak sehingga indikator ini penting digunakan untuk mengetahui efektifitas program.

Program BPNT ini tidak tepat sasaran yang dikarenakan ada beberapa masyarakat yang menjadi penerima bantuan (KPM) namun masih dapat dikatakan penghasilannya menentu tiap bulannya dan kondisi rumah sangat layak ditempati. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan ketentuan penerima bantuan BPNT yang merupakan masyarakat miskin dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan yang ada. Dengan demikian, pastilah muncul bentuk kecemburuan sosial diantara masyarakat kategori miskin namun tidak mendapatkan bantuan ini sehingga mereka akan merasa sangat kecewa kepada pihak pelaksana BPNT yang tidak mendata dengan baik yang mana salah satu pemicunya karena data yang ada sebelumnya tidak di update atau bukan data yang terbaru sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang. Maka dari itu, perlulah melakukan dan memperhatikan terkait pengupdatean data terkini guna mengetahui kondisi masyarakat sekarang untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT atau tidak.

e) Pemanfaatan Dana Bantuan

Setelah dana bantuan BPNT telah disalurkan maka tahap akhir dari pelaksanaan program BPNT adalah dengan pemanfaatan dana bantuan yang telah disalurkan dengan tetap memperhatikan terkait ketentuan- ketentuan dalam penggunaan dana bantuan tersebut. Jumlah penerimaan BPNT yang menerima sekaligus 2 bulan dan bulan berikutnya tidak mendapatkan menunggu bulan kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat di simpulkan bahwa belum efektif karena Jumlah besaran yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) pada tahun 2020 sampai 2021 berjumlah Rp.200.000 dan bantuan pangan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) hanya beras 10 kg,

telur 1 rak 30 Biji) sama buah- buahan apel 5 biji jumlah keseluruhan pangan yang di terima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai jumlah besaran yang ada di kartu KKS dan keluarga penerima manfaat (KPM) tidak mendapatkan sumber protein hewani seperti daging ayam atau daging sapi yang sudah ditetapkan agar KPM memenuhi protein dan gizi seimbang selama adanya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020.

Dengan adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masyarakat yang kurang mampu semakin terbantu dalam kebutuhan pangan, beban ekonomi mampu diminimalisir , masyarakat juga dapat memilih kebutuhannya sendiri di e-warong sesuai dengan besaran saldo yang diterima, pemilihan kebutuhan di ewarong juga bervariasi seperti karbohidrat (Beras), protein (Tempe, daging ayam/daging sapi) dan vitamin (sayur dan buah-buahan. Untuk mengurangi pengeluaran KPM seperti kebutuhan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo. BPNT ini dapat ditukarkan dengan beras, telur dan buah- buahan sesuai adanya kebutuhan di e-warong , bantuan tersebut hanya bisa melalui KKS untuk menukarkan di e-warong.

Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambatnya adalah; 1) Minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kurangnya sosialisasi dari pihak pelaksana karena tidak terjadwal setiap bulan, 2) Kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga yang kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat (DPM), 3) Lemahnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting agar suatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar, 4) Tanpa adanya sumber daya manusia dan kualitasnya yang buruk suatu kegiatan

akan sulit direalisasikan dengan semestinya meskipun sumber daya lain telah terpenuhi, 5) Ketepatan waktu penyaluran juga masih belum baik karena banyak KPM yang mengalami keterlambatan dalam menerima bantuan.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung program tersebut adalah; 1) Tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT untuk mengetahui informasi mekanisme penyaluran. 2) Lokasi e-warung yang strategis merupakan faktor pendukung yaitu jarak antara e warung dengan tempat tinggal KPM sangatlah dekat dan mudah dijangkau,3) Komitmen pemerintah dan TKS merupakan faktor pendukung ketiga dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT, 4) KPM bisa memilih komoditi sendiri bahan pangannya merupakan faktor pendukung keempat yaitu sesuai dengan kebutuhannya karena program ini ada empat komoditi bahan pangannya, dan kualitas beras yang disalurkan kepada KPM kualitasnya juga bagus, apabila berasnya tidak bagus bisa ditukarkan di e- warung, 5) bahan yang tersedia berasal dari daerah setempat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Analisis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang dimulai dari sosialisasi dan Edukasi dengan tujuan agar mereka paham terkait program BPNT sehingga akan mempermudah juga dalam pelaksanaannya, penyaluran dana bantuan dengan sasaran masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah di setiap daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur apakah penyaluran yang telah dilakukan sesuai dengan kebijakan atau tidak. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran yang seringkali dirasakan oleh masyarakat. Selain itu dalam penyaluran dana bantuan tersebut juga masih bisa dikatakan belum efektif dikarenakan adanya kebijakan dimana besaran bantuan BPNT yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah besaran yang ada di kartu KKS yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat kurang dapat terpenuhi.

2. Faktor Penghambat Dan Pendukung

Faktor penghambat dan pendukung Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Desa Wringin Anom Kecamatan Panarukan yaitu pertama, masih sangat minimnya pengetahuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Kedua, kurangnya pemantauan, pengawasan serta evaluasi dari Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten. Ketiga, kurangnya pengawasan dari pemerintah untuk mengontrol pendataan warga kurang mampu yang tidak dilakukan dengan benar sehingga masih ada warga yang kurang mampu tidak tercantum dalam daftar penerima manfaat (DPM). Keempat, kurangnya sumber daya manusia untuk pendamping di kecamatan. Kelima, dari segi ketepatan waktu penyaluran juga masih belum efektif. Faktor pendukung pertama tingginya partisipasi masyarakat dalam menerima program BPNT, Kedua lokasi e-warung yang strategis jarak antara e-warung dengan tempat tinggal KPM, Ketiga komitmen pemerintah dan TKS dalam meningkatkan program BPNT dengan melakukan verifikasi data penerima program BPNT, Keempat KPM bisa memilih komoditi sesuai dengan kebutuhannya, Kelima komoditi bahan pangan berasal dari daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S.Z. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta: Suara Bebas.
- Andrian, R. 2019. Analisis Efektifitas Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) di Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*Doctoral dissertation, Universitas Bangka Belitung*), 1-13
- Arikunto, S. 2010. Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bhinadi, A. 2017. *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya
- Hasimi, D. M. 2020. Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Revenue : Jurnal Manajemen Bisnis Islam* , 2(1), 81-94
- Isdjoyo. 2013. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang. 37–46.
- Islami, M. D. (2018). *Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Studi di Desa Sialang Panjang, Kecamatan Tembilihan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Universitas IslamRiau).
- Jarnasy, 2014. Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Kecamatan Biring kanaya. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kuncoro. 2016. Efektivitas Organisasi. Erlangga
- Kurniawan, A. 2020. Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Selotong Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*), hlm.1-141
- Maipita, 2014. Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019. Pedoman Umum Bantuan Pangan Nontunai 2019, 1–174.
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nazir,M.2010. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nisa, A.S. 2019. Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus diDesa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Raden Intan Lampung, hlm. 1-114.
- Nugroho, 2015. Pelaksanaan Diseminasi Program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT) di Desa Banyuanyar (Studi deskriptif pada masyarakat penerima bantuan pangan non tunai di Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi).
- Pantu, S. D. 2019. Analisis Dampak Program Bantuan Pangan NonTunai Daerah (BPNT-D) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Gorontalo.

Skripsi,hlm.1-10.

Pratiwi, C.D dan Imsar. 2022. Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara. *Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* , 4(12), 5684-5690.

Rahmawati. 2011. Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation diKabupaten Gowa. In *Journal of Chemical Information and Modeling*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Rijali, A. 2019. Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17 (33), hlm. 81-95

Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RSD*. Bandung: Alfabeta.

Suryawati, 2014. Penyaluran Program BPNT 2021, Pj Sekda Gowa Harap Berjalan Lancar. *Kabarikita.Id*. diakses pada: <https://kabarikita.id/2021/02/06/penyaluran-programbpnt-2021-pj-sekda-gowa-harap-berjalan-lancar/>

UNDANG UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (2) tentang kemiskinan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BPNT)

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

Peraturan Kementerian Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Pangan dan bantuan Sosial Tunai